

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Moderenisasi melahirkan perubahan dalam segala bidang perubahan yang sangat signifikan adalah perubahan peranan perempuan yang dimana dengan adanya moderenisasi perempuan dituntut untuk lebih maju hal ini dikenal dengan kesetaraan gender yang mana adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki yang membedakan hanyalah *sex* atau jenis kelamin yang menunjukkan secara biologis dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. *gender* adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (Maskulin) dan perempuan (Feminim) yang dibentuk secara sosio-kultur. Dengan adanya modernisasi peranan perempuan yakni dengan kesetaraan gender perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam segala bidang termasuk dalam bidang politik. Dengan adanya kesetaraan gender sebenarnya tidak menjadi masalah tetapi masalah timbul ketika kesetaraan gender ini melahirkan ketidakadilan gender yang pada umumnya terjadi pada perempuan dengan segala bentuk diskriminasi perempuan di nomor duakan.

Peranan perempuan dalam politik sebagai warga Negara adalah sesuatu hal yang wajar seperti bunyi dari pasal 27 UUD 1945 "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecuali.” Peran perempuan dalam politik ditandai pada keikutsertaan perempuan dalam partai politik, memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin untuk mengurus urusan masyarakat ini adalah hak-hak politik perempuan yang setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan hak politik antara perempuan dan laki-laki keduanya mempunyai hak berpolitik sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai warga negara. Hal ini di dukung dengan adanya isu globalisasi (Modernisasi) dan demokratisasi yang sarat dengan isu kesetaraan gender dimana perempuan menuntut hak-haknya sebagai warga Negara dan penghapusan keyakinan dan ideologi bahwa perempuan tidak bisa ikut serta dalam urusan politik karena perempuan itu irasional/emosional.

Kaum perempuan semakin menyadari bahwa perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kalah penting dalam kekuatan masyarakat lainnya dan karenanya mempunyai tanggung jawab bersama melakukan perannya dalam masa pembangunan guna meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka turut mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, merata dan sejahtera. Perempuan sebagai anggota masyarakat dan sebagai seorang warga negara turut berperan dalam proses politik sebagai sasaran untuk menyalurkan aspirasi yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kedudukannya setaraf atau sejajar dengan kaum pria.

Dalam agama islam atau hukum islam tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, kepala negara dan lain sebagainya. hal ini tersirat dalam

surah at-Taubah ayat 71 yang artinya "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Islam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, islam memberikan hak-hak kepada kaum perempuan setara dengan laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, islam memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana memberikan hak kepada laki-laki. jadi kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa dijabat oleh kaum perempuan.

Iklim kondusif bagi peran perempuan di bidang politik yang tercipta berbarengan dengan lahirnya reformasi hal ini dibuktikan dengan tampilnya beberapa perempuan yang menjabat di daerah tingkat II, baik sebagai bupati maupun walikota di berbagai daerah di Indonesia dan begitu juga di tingkat pusat dampak reformasi menghasilkan banyak perempuan yang menduduk jabatan sebagai menteri, anggota legislative dan lainnya.

Dalam rangka perwujudan hak-hak politik perempuan dalam negara yakni hak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin untuk mengurus urusan rakyat, beberapa waktu lalu tepatnya di kota ternate menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung dalam rangka otonomi daerah. Yang menarik dari pemilihan

kepala daerah ini adalah adanya peran perempuan yaitu pencalonan Nita Budhi Susanti sebagai kepala daerah hal ini sangat mengundang perhatian warga ternate karena pertama kalinya adanya pencalonan kepala daerah yang dijabat oleh perempuan. Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat karena (1) Boki Nita bukan putri daerah ternate jadi pencalonannya tidak harus di dukung. (2) Trauma masyarakat pada konflik ternate 2000 karena Konflik ternate terkait dengan masyarakat adat .hal ini menyebabkan masyarakat tidak menginginkan campur tangan kesultanan dalam pemerintahan karena boki nita ini adalah istri dari sultan ternate Mudaffar Syah. (3) Masyarakat masih menginginkan walikota yang lama untuk menjabat kembali. Hal ini menimbulkan masalah, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pencalonan boki nita sebagai kepala daerah. Hal ini mengundang kontroversi ada yang pro dan ada yang kontra kebanyakan yang pro adalah orang-orang kesultanan (Ternate Utara) karena boki nita adalah istri sultan ternate yakni sultan Mudaffar Syah masyarakat yang banyak mendukung boki nita kebanyakan dari kecamatan ternate utara secara masyarakat dari ternate utara mayoritas masyarakat kesultanan fenomena yang ada pada masyarakat kesultanan yang sarat akan budaya patriarkhi ternyata pro pada pencalonan Nitha Budhi Susanti sebagai kepala daerah. Dalam fenomena ini dapat dilihat kuatnya primodialisme masyarakat kesultanan sehingga melupakan budaya patriarkhi dan yang banyak tidak setuju dengan pencalonan boki nita dari ternate selatan. Masyarakat ternate selatan dalam pemilihan kepala daerah kemarin mengalami

kontroversi karena ada yang pro dan ada yang kontra karena jumlah suara di ternate selatan pecah dan sangat variatif dengan adanya pro kontra boki nita.

Tabel 1.1
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN /
KOTA

KOTA : TERNATE
PROVINSI : MALUKU UTARA

SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR
		TERNATE SELATAN	%	TERNATE UTARA	%	PULAU TERNATE	%	MOTI	%	
1.	Drs. H. SYAMSIR ANDILI dan Drs. H. AMAS DINISIE	18.858	0,63	15.610	0,52	2.715	0,25	1.180	0,49	38.363
2.	SUJUD SIRDJUDDIN, SH, MH. dan RUSTAM KONORAS, SH	6.138	0,20	3.423	0,11	718	0,06	1.186	0,50	11.465
3.	NITA BUDHI SUSANTI dan Drs. SIDIK DERO SIOKONA, Mpd	4.510	0,15	10.900	0,36	7.328	0,68	42	0,01	22.780
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										72.608

Keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Ternate No. 35/SK/KPUD-TTE/2005, Model DB 1 - KWK

Dari data rekapitulasi hasil perhitungan suara diatas terlihat bahwa jumlah suara yang di peroleh Nita Budhi Susanti sangat signifikan diwilayah Ternate Selatan dan Ternate Utara

Dalam pemilihan kepala daerah langsung ini Nitha Budi Susanti sebagai kepala daerah kota ternate tidak dapat menjabat sebagai kepala daerah padahal dari data yang didapat pemilih yang ikut dalam pemilihan pilkadal ini banyak dari kalangan perempuan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA¹**

KOTA : Ternate
 PROVINSI : Maluku Utara

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

NO.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH				
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih					
	berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kota Ternate	36.071	0,70%	37.026	0,71%	73.097
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kota Ternate	15.135	0,29%	14.738	0,28%	29.873
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPUD Kota Ternate	137	0,002%	78	0,001%	215
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)	51.343	0,49%	51.842	0,50%	103.185
5.	Jumlah TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPUD Kota Ternate					
		TPS		PPS		PPK
		203		63		4

¹Keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Ternate No. 35/SK/KPUD-TTE/2005, Model DB 1 - KWK

¹Keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Ternate No. 35/SK/KPUD-TTE/2005, Model DB 1 - KWK

Dari data diatas menjelaskan bahwa kebanyakan pemilih dari kalangan perempuan seharusnya keikutserataan Nitha Budhi Susanti sebagai calon kepala daerah didukung penuh oleh kaum perempuan guna untuk membela kepentingan kaum perempuan tapi hasil dilapangan beda peran perempuan dalam politik tidak di mendapat respon yang baik dari pemilih dari kaum perempuan yang merupakan pemilih terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Dari paparan masalah dan fenomena-fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kekalahan Nitha Budhi Susanti dalam pemilihan kepala daerah langsung yang calon kepala daerah adalah seorang perempuan secara baru pertama kalinya terjadi di dalam pemerintahan kota ternate seorang perempuan tampil sebagai calon kepala daerah.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, **“Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kekalahan Nitha Budhi Susanti Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2005 Di Ternate” ?**

C. Kerangka teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan teori secara sistematis dan ilmiah. Unsur yang besar besar perannya dalam suatu penelitian adalah teori, karena dengan unsur inilah penulis akan menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, menyatakan tentang teori :

“Sarana pokok untuk menyatakan hubungan system atau fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu serangkaian yang ogis dari proporsi/ lebih”²

1 Kepemimpinan Politik

a. Pengertian kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “**pimpin**” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “**pimpin**” lahirlah kata kerja “**memimpin**” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “**pemimpin**” yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun.³

Pemimpin dituntut untuk mengerti dan memahami tujuan organisasi, sehingga tugas yang dikerjakan dapat sesuai dengan yang

² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian survai*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 21.

³ S. Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, januari 1985, hal: 5

direncanakan. Pengertian kepemimpinan menurut Soerjono Sukanto adalah :

“Kemampuan seseorang yakni pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.”⁴

Soekarno K. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Manajemen, mengutip pendapat George R. Terry yang memberikan definisi kepemimpinan sebagai berikut :

“Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha untuk mencapai tujuan”⁵

Konsep dasar dari kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain agar bersedia berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan pimpinan.⁶

Dibawah ini beberapa definisi yang cukup mewakili tentang pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli dalam buku kepemimpinan dalam organisasi yang dikutip oleh Gary Yulk adalah sebagai berikut.⁷

⁴ Soejono Sukanto, *Administrasi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal: 79

⁵ Soekarno K., *Dasar-dasar Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, hal.52.

⁶ Hadari nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Gajah Mada University Press, 1993, hal.32

⁷ Gary Yulk yang dialih bahasakan oleh Yusuf Udaya, *Kepemimpinan dalam organisasi*, Prenhallindo, Jakarta, 1998, hal: 2

1. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*share goal*)
2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu/beberapa tujuan tertentu.
3. Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.
4. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada di atas kepatuhan terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi.
5. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
6. Para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde social dan diharapkan dan dipersepsikan melakukannya.

b. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Dalam mengukur sifat kepemimpinan dapat di tinjau dari dua perspektif yaitu :⁸

1. Perspektif Barat

⁸ Aunur Rohim Fakhri & IIP Wijayanto, Kepemimpinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal: 28

- Memiliki kemampuan mempengaruhi dan membujuk orang lain (*inducing*). (Edwin A. Locke)
- Memiliki kemampuan manajerial yang baik karena kepemimpinan itu sebagai sebuah proses yang lebih dari sekedar menduduki jabatan formal. (*Observasi John Gardner*)
- Memiliki konsep relasi dimana pemimpin yang efektif harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya.
- Memiliki visi yang jelas, serta mampu menterjemahkan visi tersebut sebagai misi yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- Memiliki sikap yang optimistis dalam mengemban amanah organisasi.
- Memiliki ntrait approach (*pendekatan watak*) yang mencolok sebagai hasil dari proses latihan dan pendekatan situasional atau perilaku yang tersimak (*observed behavior*) bukan pada pembawaan (*inborn*) yang hipotetikal.

2. Perspektif Islam

- Harus mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.

- Memiliki kemampuan manajerial yang baik karena seorang pemimpin itu harus dipilih dari orang-orang dengan kualitas yang terbaik.
- Memiliki konsep relasi yang baik karena seorang pemimpin harus mampu menjembatani berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya.
- Visinya adalah Al-Quran, misinya adalah menegakkan kebenaran.
- Memiliki sikap tawadhu' dan mawas diri dalam mengemban amanah ALLAH SWT, karena pada prinsipnya kepemimpinan itu bukan saja harus dipertanggung jawabkan di depan lembaga formal tapi yang lebih penting lagi dihadapan Allah SWT.
- Memiliki sifat siddiq (*benar*), amanah (*terpercaya*), tabligh (*menyampaikan apa adanya*), fathonah (*pandai*) serta menyadari sepenuhnya bahwa Allah mengaruniakan kemampuan yang berbeda-beda bagi setiap orang (*Q.S: AL-Jumlah :4*) serta menerimanya dengan rasa syukur dan ikhlas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan kepemimpinan Perspektif Islam dan Perspektif Barat adalah, jika perspektif islam melihat

pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sifat dan kepemimpinannya mengandung unsur-unsur religi sekaligus meliputi seluruh aspeknya secara kompleks, sedangkan perspektif barat memandang sifat yang baik dari seorang pemimpin adalah sebuah proses yang tersimak dengan parameter yang juga bersifat materi dan dapat diukur.

c. Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan yang paling populer yang sering dipakai oleh para ahli dalam menilai kepemimpinan seseorang, diantaranya menurut Djati Julitriarsa dan John Suprihanto, dalam bukunya Manajemen Umum Sebuah Pengantar membagi empat kategori yaitu :

1. Kepemimpinan Otoriter (*Authoritarian leadership*)

Seorang pemimpin mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa tidak perlu mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan orang lain, melainkan langsung saja memerintahkan apa yang dikehendaknya. Jadi, tidak ada kesempatan yang diberikan kepada bawahan untuk diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kepemimpinan Demokatis (*Democratic leadership*)

Pada tipe kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta pemanduan berbagai pendapat atau

pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tipe kepemimpinan demokratis hanya akan ada dalam organisasi yang menetapkan system "open management" atau "democratic management", yang memiliki sifat-sifat antara lain :

1. Ikut sertanya bawahan dalam pengurusan (*social participation*)
 2. Adanya pertanggungjawaban dan pemimpin terhadap bawahannya (*social responsibility*)
 3. Adanya dukungan terhadap pemimpin (*social support*)
 4. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh bawahan terhadap pemimpinnya (*social control*)
3. Kepemimpinan Kebapakan (*Paternalistic Leadership*)

Sesuai dengan namanya, maka dalam tipe ini terdapat pengaruh kebapakan antara seorang pemimpin dengan kelompok yang dipimpinya. Seorang pemimpin yang memiliki tipe ini akan selalu berusaha melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bawahannya. Namun tipe ini hanya tepat diterapkan dalam organisasi tertentu dengan kondisi tertentu pula, sebab dalam tipe atau gaya kepemimpinan ini terdapat kelemahan, yakni akan

menghambat kepercayaan pada diri sendiri pemimpin tersebut serta anggota-anggota kelompok/bawahan yang dipimpin.

4. Kepemimpinan Situasional (*Situational Leadership*)

Tipe ini menitik beratkan bahwa faktor yang paling utama untuk menentukan gaya kepemimpinan adalah situasinya, sehingga setiap pihak baik pemimpin maupun yang dipimpinnya (bawahan), selalu mengikuti situasi yang ada pada waktu itu. Adapun kepemimpinan diambil berdasarkan pada saling berhubungan diantara hal-hal berikut ini :

- a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan
- b. Jumlah dukungan sosioemosional diberikan oleh pimpinan.
- c. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu.⁹

d. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk memandu, menuntut, membimbing, membangun, memberi motivasi, menjalankan organisasi dan membawa masyarakat pada tujuan dan sasaran yang ingin

⁹ Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, *Management of Organizational behavior, utilizing Human Resourcer*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc, 4rd Edit, 1982, Hlm 50.

dicapai. Dalam teori kepemimpinan klasik disebutkan bahwa fungsi kepemimpinan mencakup: perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Penganut aliran behaviorisme berpendapat bahwa fungsi dan peranan kepemimpinan adalah :

1. Menetapkan tujuan dan menegaskan arah untuk mencapai tujuan.
2. Melengkapi sarana untuk mencapai tujuan.
3. Melengkapi dan menegaskan tatanan organisasi.
4. Memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dan mengadakan hubungan antar kegiatan.
5. Memberikan fasilitas kepada kelompok dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

e. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan cara bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya untuk merencanakan, merumuskan dan menyampaikan perintah dan ajakan kepada bawahannya. Menurut S. Pamudji dalam buku *Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*, gaya kepemimpinan biasanya dipakai yaitu :¹¹

1. Gaya Motivasi

Yaitu pemimpin dalam menggerakkan orang-orang dalam mempergunakan motivasi baik yang berupa imbalan ekonomis dengan

¹⁰ Rustandi, *Gaya Kepemimpinan; Pendekatan Bakat Situasional*, Cetakan Kedua, Armico, Bandung, 1987, hal; 25

¹¹ S. Pamudji, *opcit*, hal:90-94

memberikan hadiah-hadiah, jadi bersifat positif maupun yang berupa ancaman jadi bersifat negatif.

2. Gaya Kekuasaan

Yaitu pemimpin yang cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan orang-orang. Cara bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaan akan menentukan gaya kepemimpinannya. Disini dibedakan antara gaya otokrasi, gaya demokratik dan gaya bebas.

- a. Gaya Otokratik, yang juga disebut kepemimpinan otoritarian yaitu pemimpin yang menggantungkan pada kekuasaan formalnya, organisasi sebagai milik pribadi, menyamakan tujuan dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan bersifat pribadi, pengikut adalah alat dan harus mengikuti saja dan tidak memperoleh kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan.
- b. Gaya Partisipatif, disebut juga dengan gaya demokratik, yaitu pemimpin yang memandang manusia adalah makhluk yang bermartabat dan harus dihormati hak-haknya. Dalam menggerakkan bawahannya menggunakan persuasi dan memberikan contoh-contoh. Kepentingan dan tujuan organisasi sejauh mungkin diintegrasikan dengan

kepentingan dan tujuan pribadi para pengikut mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pemimpin.

- c. Gaya Bebas yaitu kepemimpinan yang hanya mengikuti kemauan bawahannya, menghindarkan diri dari penggunaan paksaan atau tekanan pemimpin lebih banyak memberikan kebebasan kepada bawahan untuk menentukan tujuan organisasi dan juga dalam menghadapi masalah organisasi.

Dari Definisi-definisi diatas terlihat banyak kesamaan-kesamaan komponen yang mendukung tentang teori kepemimpinan yaitu :

1. Kemampuan orang untuk mempengaruhi;
2. Kemampuan orang untuk membimbing dan mengarahkan;
3. Kemampuan untuk mengarahkan pada tujuan;
4. Adanya pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi;
5. Adanya kerja sama;
6. Adanya usaha bersama mencapai tujuan.

b. Kepemimpinan Politik

Adapun pengertian kepemimpinan atau leadership diberikan oleh

Dr. Buchari Zainun :

“ Leadership atau kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau ketangguhan yang bersumber dari kemampuan untuk mencapai cita-cita dengan keberanian mengambil resiko yang bakal terjadi.”¹²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepemimpinan dan keberanian ditopang dengan apa yang dinamakan wewenang. Dalam hal ini selo soemardjan mengatakan: “Pengertian wewenang diartikan sama dengan kekuasaan.” Mengikuti ideal tipe yang dikemukakan Weber, Ann Ruth Willer mengatakan :

“Kepemimpinan yang dimiliki kewenangan kharismatik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mendapatkan kehormatan, ketaatan, dan kehebatan terhadap dirinya sebagai sumber dari kekuasaan tersebut.”¹³

Kepemimpinan Politik merupakan cerminan dari kapasitas dirinya sebagai subyek politik. Dikatakan sebagai subyek politik karena partisipasi politik yang dilakukan seorang yang menduduki jabatan politik mempunyai pengaruh yang sangat luas. Dengan demikian kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi salah satu faktor atau variable yang mempengaruhi dinamika politik daerah.

Partisipasi Politik dari subyek politik, termasuk seorang kepala daerah dipengaruhi oleh lingkungan yang langsung bersentuhan dengan dirinya seperti pengalaman pribadinya dibidang pendidikan, keluarga, lingkungan pertemanan, tetangga atau aktivitas politik yang pernah

¹² YW Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam masyarakat modern*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993 hal.14

¹³ Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1964 : hal 342

dijalannya. Bentuk partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Siapa pun yang menjadi kepala daerah dalam pilkada, berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (*plural societies*). Menurut Nasikun, pertanda paling jelas dari masyarakat tersebut adalah tidak adanya kehendak politik bersama karena masing-masing mengikatkan diri pada hal-hal yang bersifat primordial.

Kepemimpinan kepala daerah dalam pilkada juga dihadapkan pada era reformasi dimana tingkat partisipasi politik dari masyarakat sangat besar bersamaan dengan bangkitnya kembali sistem politik multi partai, terutama dari masyarakat kelas menengah yang terdiri dari kelompok intelektual, mahasiswa, kalangan media massa dan profesional yang berperan mengontrol dan mengimbangi kekuatan negara. dalam perspektif komunikasi massa, kelas menengah terutama media massa selalu berperan sebagai opinion leader.

Dari uraian diatas maka kepemimpinan seorang kepala daerah mencakup seluruh wilayah di daerah tersebut yang mampu menjalankan peran serta tugas sebagai kepala daerah yang dipengaruhi oleh sistem politik di daerah serta budaya masyarakat di daerah.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kepemimpinan Politik .

Kepala daerah merupakan pemimpin dalam suatu kota, untuk itu agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepemimpinan kepala daerah ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian kepemimpinan yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain oleh George R. Tery berpendapat bahwa :

“Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin”

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan adalah followership atau pengikut. Seseorang menjadi pemimpin karena ada beberapa orang berkehendak untuk mengikuti yaitu bertindak sesuai keinginan pemimpinnya.

Followership ini menurut Jefta Leibo diklasifikasikan menjadi 5 golongan yaitu :¹⁴

a. Followership Berdasarkan Naluri.

Terjadi beberapa pengikut dalam hal ini dikarenakan adanya dorongan pada mereka untuk menaruh kepercayaan pada seseorang sehingga mereka bersedia untuk bertindak tertentu yang dikehendaki oleh orang yang mendapat kepercayaan. Kepengikutan jenis ini disebut dengan kepemimpinan kharismatis yang berarti kepatuhan karena percaya.

¹⁴ Max Weber dalam jefta Leibo, Su. Sosiologi pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda), Andi Offset, Yogyakarta 1995, hal 38

b. Followership Berdasar Agama

Kepengikutan ini timbul karena beberapa orang memandang bahwa ada orang lain yang mempunyai kelebihan dalam bidang keagamaan. Kita ketahui bersama bahwa agama merupakan kepercayaan tingkat tinggi, oleh karena itu biasanya kepengikutan keagamaan ini mempunyai sifat yang fanatik.

c. Followership Berdasarkan Tradisi

Ini timbul pada sejumlah orang karena kebiasaan secara turun temurun.

d. Followership Berdasarkan Rasio

Timbul dikalangan orang-orang cendekiawan/pelajar yang terlihat adanya demokratis didalam mengambil keputusan.

e. Followership Berdasarkan Peraturan

Ini terlihat pada organisasi/kelompok-kelompok tertentu dimana hubungan antara orang yang satu dengan yang lain ditata menurut aturan-aturan tertentu.

Budaya Politik

Budaya politik bukan merupakan suatu teori, ia hanya menunjuk suatu teori-teori. Ada beberapa ilmuan politik yang telah menggunakan pendekatan budaya politik untuk membentuk teori, Lucian Pye dalam Denis Kavanagh misalnya :

“Memusatkan kajian pada tema pembangunan politik dengan memperbincangkan berbagai cara bagaimana budaya politik dinegara-negara berkembang indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti wawasan politik, bagaimana hubungan antar tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik”¹⁵

Sidney Verba dan Almond memberikan definisi tentang budaya politik sebagai berikut :

“ Budaya politik terdiri dari system kepercayaan-kepercayaan empiris, symbol-simbol ekspresif, nilai-nilai yang membatasi situasi dimana tindakan politik itu terjadi. Ia menyediakan orientasi subyektif bagi politik. Istilah ini menunjuk pada orientasi yang secara politik terukur, apakah seperangkat orientasi kognitif, afektif dan evaluasi, pada orientasi semua anggota pada suatu system politik dan orientasi semua anggota pada suatu system ilmu politik”¹⁶

Berdasarkan pada teori tersebut Budaya Politik adalah suatu sebaran sikap, nilai, sistem kepercayaan, pola orientasi (kognitif., afektif dan evaluasi) informasi dan keterampilan tertentu, sebagaimana individu yang berpengaruh terhadap apa yang hendak mereka lakukan, demikian pula budaya politik suatu bangsa akan berpengaruh terhadap suatu system politik masyarakat kota dilandasi dengan nilai oleh system, kepercayaan yang melekat padanya.

Berdasarkan pada teori-teori para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa penentu keberhasilan kepemimpinan politik seseorang adalah :

¹⁵ Darmanto Jatman, 1986, *Sekitar Masalah Kebudayaan*, Alumni, Jakarta

¹⁶ Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1990, *budaya politik, tingkah politik dan demokrasi di lima Negara*, Bima Aksara, Jakarta

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ini didasarkan pada pemimpin rasio, melalui pendidikan akan terlahir manusia yang terpelajar dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang memungkinkan semakin tinggi pula daya pikir untuk lebih kritis terhadap dirinya dan lingkungannya serta akan lebih mengerti peran dirinya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam pemilihan kepala daerah pendidikan mempunyai peranan penting dalam tingkah laku politik.

2. Faktor Keturunan

Faktor keturunan ini didasarkan pada pemimpin tradisional, faktor turunan sering menjadi pertimbangan dalam menilai calon kepala daerah, latar belakang keluarga sering dikaitkan dengan kecakapan seorang pemimpin. Seorang calon kepala daerah (walikota) yang berasal dari keluarga yang bijaksana dan arif akan lebih dipertimbangkan oleh masyarakat.

3. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian dari seorang calon kepala daerah akan berpengaruh pada tingkah laku, perbuatan dan kebijakan seorang kepala daerah dalam memimpin pemerintahan. Sikap dan tindakan seorang pemimpin, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan social, akan memberikan suatu pengaruh yang sangat besar bagi

masyarakat dan lingkungannya. Faktor kepribadian akan dipandang sebagai cermin kepemimpinan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu tingkah laku dari figure seorang kepala daerah sangat menentukan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan dan di masyarakat. Hal ini terkait dengan pendekatan pada sifat kepemimpinan dan pemimpin yang kharismatik.

4. Faktot Agama

Faktor agama ini didasrkan pada followership berdasar agama. Faktor agama menjadi salah satu penentu bagi terpilihnya seorang calon kepala daerah. Di dalam masyarakat agama merupakan dasar dari kaidah-kaidah kehidupan, dengan agama seorang pemimpin dapat mengontrol masyarakatnya ke jalan yang lebih baik, bermoral dan berkepribadian baik. Masyarakat dalam memilih seorang pemimpin akan mempertimbangkan pada pemimpin yang lebih kuat dalam beragama.

5. Faktor Budaya Politik

Dalam pemilihan kepala daerah faktor budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. istilah budaya politik yang dipakai disini mencakup masalah-masalah kegiatan politik atau lebih tepatnya dalam pemilihan kepala daerah. Seseorang dapat mengalami

dampak dari berbagai bentuk dan tahapan dari proses politik, seperti konflik, paksaan dan tawar-menawar politik dan mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu. Faktor ini terkait dengan teori budaya politik.

Dari paparan penjelasan, peneliti mengambil suatu gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan politik perempuan adalah faktor pendidikan atau intelektualitas pemimpin, kepribadian pemimpin, (latar belakang keturunan yakni status social pemimpin), faktor agama dalam hal ini perspektif religi terhadap pemimpin perempuan, faktor kepribadian yaitu daya tarik seorang perempuan dari sikap serta tingkah laku di hadapan masyarakat dan yang terakhir adalah faktor budaya politik seorang perempuan yakni proses kampanye dan aktifitas organisasi menyangkut pada orientasi peran perempuan dalam kehidupan politik

2. Peran Perempuan Dalam Politik

a. Peranan

Peranan menurut Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Hellena S. Robin adalah :

“seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi dalam suatu kelompok sosial”¹⁷

Soejono Soekanto, memberikan pengertian tentang peranan sebagai berikut :

“peranan (pole) adalah merupakan efek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”¹⁸.

b. Perempuan dalam politik

Hak perempuan dipandang dari sisi agama islam sama dengan hak laki-laki. Perempuan berhak untuk mengembangkan dirinya dalam segala bidang termasuk dalam bidang politik yaitu wanita sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada perempuan khususnya dan pada seluruh masyarakat pada umumnya. Dalam islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa, keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan masalah umat baik laki-laki maupun wanita, karena masalah ini dipandang sebagai masalah yang satu yaitu masalah manusia. ketika perempuan atau laki-laki mengurus dan

¹⁷ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin. Terjemahan Edi S. Siregar, *Kamus analisa sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 1989, hal. 220.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 268

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat berarti telah melakukan peran politik

Dalam politik wanita harus memiliki dua wawasan yaitu tanggung jawabnya dan wawasan bernegaranya disatu pihak, dan peningkatan kesadaran untuk mengatasi ketimpangan struktural antara pria dan wanita dilain pihak. Perempuan sebagai makhluk hidup/manusia mempunyai martabat yakni berhak beraspirasi pada kemandirian dan mempunyai hak asasi mengadakan aktualitas diri dalam mengembangkan bakat dan potensinya. Dalam hal ini wanita sebagai manusia yang mempunyai hak asasi berhak atas hukum dan pemerintahan yakni hak yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang sebagai warga negara. bahwa UUD 1945, terutama pasal 27, menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung tinggi hal itu. Siapakah warga negara itu? Sudah tentu laki-laki dan perempuan. Hak perempuan untuk mencari keadilan melalui proses hukum serta haknya dalam kehidupan politik diakui dan dijamin secara konstitusi. Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dalam politik adalah dicanangkan 30 % kuota bagi perempuan dalam perebutan kursi legislatif, gerbang bagi perempuan untuk ikut menentukan warna kehidupan bermasyarakat melalui produk hukum dan perundang-undangan sudah terbuka. Kaum perempuan harus memanfaatkan hal ini dengan baik, perempuan harus ikut pemilu.

Hak-hak politik perempuan menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam berbagai lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik perempuan tersebut mencakup¹⁹:

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik

Perempuan dalam politik mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki mempunyai hak politik yang sama yakni sama-sama berkedaulatan sebagai warga Negara yang mempunyai hak asasi untuk ikut serta dalam urusan Negara dan bangsa .

Dalam perihal peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa diatur dalam garis besar haluan negara (GBHN) menentukan²⁰:

1. Pembangunan yang menyeluruh masyarakat ikut serta pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang oleh karena itu wanita punya hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala bidang kegiatan pembangunan.

¹⁹ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996. hal 400

²⁰ Hardjito Notoputro, *Peranan Wanita*, Jakarta, Ghalia Ind. 1997.

2. Peran wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggungjawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif.²¹ Hal-hal ini yang menghalangi perempuan menjadi anggota parlemen.:

1. Adanya budaya atau asas patriarkhi. Persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
2. Berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki, perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

²¹ Matland, Richard E. 2001. "Sistem perwakilan dan pemilihan kaum perempuan: pelajaran untuk Indonesia", di dalam *keterwakilan perempuan dan system pemilihan umum*. Jakarta: national democratic institute dan kantor menteri Negara pemberdayaan perempuan, hal. 22

3. Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini public mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.
4. Tidak adanya jaringan antara organisasi masa. LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

c. Analisis Gender

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan ciri sifat ini dapat dipertukarkan. Dalam masyarakat telah tertanam keyakinan tentang kodrat yang ada pada diri perempuan yakni mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan padahal merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga serta mendidik anak bisa diurus oleh laki-laki inilah yang disebut gender sesuatu yang dapat dipertukarkan tidak dapat ditakdirkan pada pihak perempuan saja terkecuali dalam hal mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat wanita yang diberikan tuhan pada perempuan yang hakiki dan tidak dapat dilakukan oleh kaum laki-laki.

Masalah yang terjadi dalam masyarakat tentang kesetaraan gender adalah telah melekatnya budaya yang menomorduakan perempuan seperti perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dan perempuan ditakdirkan untuk tinggal dirumah.

Sejauh perempuan melangkah atau sebanyak ilmu yang diperoleh perempuan tempatnya nanti pasti perempuan di dapur juga ideologi semacam ini dikuatkan dengan adanya budaya patriarkhi.

Budaya Patriarkhi adalah budaya yang mana kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur kaum perempuan. Dalam masyarakat patriarkhi, selalu berkembang dan memandang kepada siapa yang mereka perintah yaitu kaum perempuan. Kaum perempuan yang tidak disiplin, kaum perempuan tidak sekuat kaum laki-laki. Pandangan-pandangan seperti ini menimbulkan suatu image terhadap kaum perempuan bahwa kaum perempuan cenderung lebih mendahulukan perasaan (emosi). Dari anggapan-anggapan inilah kaum perempuan tidak bisa memimpin, oleh karena itu perempuan ditempatkan pada posisi tidak penting yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan, yakni anggapan tidak penting dalam urusan publik.

Dari studi yang dilakukan menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan banyak ketidakadilan gender seperti²² :

1. Terjadi Marginalisasi (*pemiskinan ekonomi*) terhadap kaum perempuan. Yang dipermasalahkan adalah marginalisasi terjadi disebabkan oleh perbedaan gender misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini disebabkan karena asumsinya bahwa petani identik dengan laki-laki.

Dengan adanya masalah ini banyak petani perempuan tergesur dari

²² Mansour Fakih, *Analisis gender & Transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal.72.

sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergesurnya ani-ani, kredit untuk petani yang artinya petani laki-laki. Jadi yang menjadi masalah adalah pemiskinan petani perempuan akibat bias gender

2. Terjadinya Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara banyak peraturan atau kebijakan dibuat tidak melibatkan perempuan karena anggapan bahwa perempuan pasti akan nantinya kedapur juga, dan kenapa perempuan harus berpendidikan yang tinggi ini semua adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk subordinasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda misalnya anggapan bahwa perempuan itu emosional sehingga dianggap tidak cocok untuk tampil sebagai pemimpin partai atau manajer ini semua adalah diskriminasi berdasarkan gender.
3. Pelabelan Negative (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan bahwa laki-laki pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' dan oleh karena itu boleh saja di bayar lebih rendah.
4. Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu , umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup

kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan.

5. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*).

Dari paparan tentang analisis gender dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam lingkup politik bahwa wanita masih diragukan untuk menjadi seorang pemimpin padahal sebagai manusia dan sebagai Warga Negara perempuan juga memiliki hak berpartisipasi dalam politik atau dalam urusan masyarakat. Pandangan analisis gender tentang peran perempuan dalam sector public atau politik yakni sebagai warga Negara dan bagian dari masyarakat perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki untuk memajukan masyarakat. Wanita berhak dipilih dan memilih anggota majelis, wanita mempunyai hak untuk ikut dalam partai politik, mencalonkan diri sebagai anggota majelis, presiden dan kepala daerah serta jabatan-jabatan politik lainnya. Analisis gender juga menentang adanya subordinasi terhadap perempuan yang menganggap perempuan emosional jadi tidak bisa seorang perempuan menjadi pemimpin. Dengan memakai analisis gender tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan dalam politik keduanya berhak berpartisipasi atau berperan aktif dalam politik guna untuk membangun masyarakat dan Negara dan sebagai warga negara tidak ada perbedaan

antara laki-laki dan perempuan ini di dukung oleh undang-undang bahwa semua warga Negara berhak dan wajib dalam memajukan Negara.

d. Faktor Penghambat Peran Perempuan Dalam Politik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan :

Hambat / menghambat adalah sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Penghambat adalah yang menghambat.²³

Faktor penghambat perempuan ikut berperan dalam bidang politik di bagi menjadi dua :

a. . Faktor Internal

Salah satu dampak dari adanya modernisasi yang sangat signifikan adalah secara ideal mendorong adanya persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih jalan hidupnya, tetapi pada saat semua ini diimplementasikan selalu ada kendala seperti struktur budaya yang tidak merespon hal ini dengan baik.

Sejauh menyangkut peran perempuan dalam sektor politik/publik ada beberapa kendala bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam politik secara optimalisasi. secara struktur budaya, kondisi psikologis dan interpretasi keagamaan mempunyai andil besar dalam menghambat peningkatan peran perempuan dalam politik.

1) Pengaruh figur laki-laki (ayah atau suami)

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka. 1997. hal 337

Naiknya perempuan di atas panggung politik tidak terlepas dari latarbelakang adanya pengaruh dari figur laki-laki baik ayah atau suaminya. Hal ini merupakan faktor penting untuk menggugah emosi dan memperkuat basis dukungan massa. Jika figur seorang laki-laki yang berada di balik sosok seorang perempuan adalah seorang figur laki-laki yang di sukai oleh masyarakat hal ini membawa efek baik bagi karir perempuan dalam politik tapi jika tidak efek yang di dapat karir perempuan akan terhambat. Seperti yang dilakukan megawati setiap kampanye politik, gambar atau patung bung karno selalu menyertainya sebagai alat untuk menggugah emosi masyarakat. kerinduan akan figur bung karno sebagai politikus andal dilampirkan kepada Megawati.²⁴

2) Kondisi-Kondisi Perempuan

Proses sosialisasi di atas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terbentuknya psikologis perempuan. Agar diterima masyarakat perempuan dengan sukarela menginternalisasikan *stereotype feminisme* pada dirinya, sehingga pekerjaan domestic dianggap sebagai tugas sucinya. Sebaliknya perempuan merasa berdosa untuk melepaskan diri

²⁴ Siti Musdah Mulia & Anik Farida "Perempuan & Politik" PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, Hal 20.

mereka dari gravitasi “empat dinding rumahnya” dan berperan secara optimal di sektor publik.²⁵

3) Rendahnya Daya Saing Perempuan

Kuatnya budaya patriarki yang menguasai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang akhirnya menjadikan perempuan menjadi makhluk lemah dan kurang mampu bersaing dengan laki-laki. Pendidikan menjadi kunci bagi kurang berkembangnya potensi yang ada dalam diri perempuan karena selama ini laki-lakilah yang menjadi prioritas untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan kaum laki-lakilah yang menjadi prioritas untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya dengan cara membiarkannya untuk terjun ke dunia politik sejak masa kanak-kanak.²⁶

b. Faktor Eksternal

1) Kuatnya budaya patriarki

Kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat tentang kodrat perempuan yang diharuskan mengurus ruang domestic serta menganggap perempuan tidak cocok untuk turut berperan dalam urusan public. Kodrat perempuan tersebut kemudian ditarik dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan menghasilkan perbedaan perempuan dan laki-

²⁵ Marwah Daud Ibrahim “*Teknologi, emansipasi dan transidensi*” Bandung P.N. Mizan 1994

²⁶ Ihrohmi “*kajian wanita dan pembangunan*” Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal 49

laki terutama dalam bidang politik laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan.

2) Sistem Politik Yang Tidak Ramah Terhadap Perempuan

Budaya patriarki yang kuat memberikan kontribusi bagi keterbatasan pada perempuan untuk terjun dalam dunia politik perempuan di dunia politik memang diberikan tempat tersendiri tapi hal tersebut hanya bersifat "maya" dan hanya mempersempit ruang gerak perempuan itu sendiri, seperti pemberian kuota 30% untuk calon legislative tapi pada pemilihan keanggotaan perempuan masih berada di urutan bawah, urutan calon terdepan di dominasi oleh laki-laki. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam sector public seperti pada lembaga pemerintahan yakni di DPR/DPRD, MPR serta lembaga tinggi lainnya menegaskan bahwa system politik Negara ini masih mengucilkan kaum perempuan.

3) Pemahaman Agama

Keterbatasan perempuan untuk terjun dalam dunia politik juga di pengaruhi oleh interpretasi agama yang selalu menunjuk kaum perempuan selalu di bawah pengawasan laki-laki, yakni perempuan selalu di bawah pengawasan kuasa bapak-bapak mereka dan suami-suami setelah menikah. Hal tersebut membuat perempuan tidak dapat membuat keputusan ketika menginginkan untuk terjun pada sector

Pilkada secara langsung memiliki asumsi-asumsi positif dalam rangka peningkatan demokratisasi di tingkat daerah mencakup²⁸:

1. Penarikan Kedaulatan Yang Dititipkan DPRD.

Dengan adanya pilkada langsung masyarakat di daerah bisa memilih calon DPRD secara langsung. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Sumber Kekuasaan Adalah Rakyat.

Sumber kekuasaan kepala daerah adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan muara dari segala kiprah, cita-cita, perilaku serta kegiatan kepala daerah, sumber kekuasaan itulah yang membedakan apakah seorang kepala daerah layak disebut pemimpin atau elit politik.

3. Rakyat Adalah Subjek Demokrasi

Rakyat sebagai subjek dari demokrasi memosisikan sebagai pelaku demokrasi melalui proses pembuatan kebijakan maupun rekiutmen pimpinan politik. Dengan demikian sebagai warga negara masyarakat menjalankan hak-haknya dalam bernegara yakni berhak memilih calon pemimpinnya dan berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin.

4. Demokrasi Merupakan Sistem Politik Terbaik Dari Yang Ada.

Demokrasi adalah sistem politik yang menjunjung tinggi pemerintahan rakyat yang memberi kekuasaan sepenuhnya ditangan rakyat.

Pilkada yang merupakan salah penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka penerapan demokratisasi serta menjunjung tinggi hak masyarakat

²⁸ Joko j. prihatmoko, pemilihan kepala daerah langsung,pustaka pelajar, yogyakarta,2005.hal.21.

daerah merupakan suatu proses pemilihan yang menarik karena pesta demokrasi ini baru terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia yang dulunya dipilih diruang DPRD menjadi dipilih di ruang public yang melibatkan banyak kontestan. Adapun kelebihan dan kelemahan pilkada langsung yaitu :

a. Kelemahan pilkada langsung :

1. Dana yang dibutuhkan besar.

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkada Langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistic maupun keamanan. Besarnya dana untuk Pilkada Langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round atau run-off system*), ditengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan lain kata, penyelenggaraan Pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

2. Membuka Kemungkinan Konflik Elite dan Massa.

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan Pilkada Langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam Pilkada Langsung bisa bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antarmassa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial,

di mana pemimpin (patron) dapat memobilisasi pendukungnya (client).

3. Aktivitas Rakyat Terganggu.

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu- isu dan manuver- manuver yang dilakukan para calon.

b. Kelebihan pilkada langsung :

1. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai- partai atau fraksi- fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya kepala daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat

menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala Negara terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali bersebrangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.

3. Sistem Pilkada Langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. *Check and Balanced* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
5. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.²⁹

²⁹ Tri Ratnawati, *Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di masa Transisi*, Kasus UU no.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan*

Adapun asas-asas pilkada langsung yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 32/2004 dan ditegaskan kembali pada Pasal 4 Ayat (3) PP No. 6/2005. bunyi Pasal 56 Ayat (1) :

“ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Adapun pengertian dari asa-asa tersebut adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada, hal umum mengandung makna bahwa hak memilih dalam pilkada untuk seluruh warga Negara yang memenuhi syarat.

3. Bebas

Setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihan dalam pilkada tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain.

4. Rahasia

Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta : Jur. IP, FISIPOL bekerjasama dengan Pustaka Pelajar , agustus 2003, hal. 23.

³⁰ Joko j. prihatmoko, *pemilihan kepala daerah langsung*,pustaka pelajar, yogyakarta,2005.hal.206

pemilih memberikan suaranya dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan hal ini dijamin .

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas serta pemantau pilkada serta pihak yang terkait harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan pilkada langsung sama dengan asas yang berlaku pada pemilu. Asas pilkada merupakan prinsi-prinsip yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pilkada serta sebagai sarana agar pilkada terlaksana dengan demokrasi.

Pilkada langsung harus diakui membuka banyak peluang partisipasi politik masyarakat. Dengan semakin besar peluang partisipasi politik masyarakat, akan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Tidak saja menyuarakan tetapi masyarakat juga dapat mengontrol pemerintah daerah untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat karena dengan pilkada langsung rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada pemimpin di daerah.

Secara lebih khusus, pilkada juga memberi peluang bagi perempuan di daerah untuk berpartisipasi secara politik. Sebagaimana diketahui partisipasi politik perempuan di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi perempuan ini dapat dilihat dari representasi perempuan di lembaga-lembaga negara seperti parlemen dan pemerintah. Komposisi parlemen hasil pemilu tahun 2004 lalu menunjukkan representasi perempuan hanya 11,27 persen atau 62 orang dari 550 anggota legislatif meskipun dalam Undang-Undang Pemilu secara tegas disebutkan tentang kuota 30 persen bagi perempuan dalam lembaga-lembaga negara.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam politik.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian ilmu pengetahuan terutama tentang peran perempuan dalam politik di maluku utara (ternate). Dalam hal ini mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala daerah langsung.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini di maksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian.

Menurut Koentjaraningrat konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teori sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian atau suatu konsep sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut.

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki olehnya.

b. Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan politik adalah kemampuan seorang untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan politik.

c. Peran Wanita Dalam Poltik

Perilaku perempuan dalam mengaspirasikan wawasan dan keahliannya untuk mengurus urusan publik dan ikut aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

d. Pilkada langsung

Pemilihan kepala daerah langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia yang dipilih langsung oleh masyarakat secara terbuka guna penyelenggaraan otonomi daerah

F. Defenisi operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur dengan membaca definisi operasional dalam penelitian, seseorang akan mengetahui baik buruknya pengukuran³¹.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dalam politik dapat dilihat dari : (Lefta Leibo : 38)

- Faktor Pendidikan/intelektualitas
- Keturunan (latar belakang keturunan & status social/ekonomi)
- Faktor Keagamaan (Kearifan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan)
- Kepribadian (Daya Tarik, Tingkah laku)
- Budaya Politik (proses kampanye,aktifitas organisasi politik)

(Gabriel Almond & Sidney Verba)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam politik

a. Faktor Internal

³¹ Winarno Surachmad, *Pasar-Pasar Teknik Research*, Bandung, Tarsito, 1987, hal.131.

- Pengaruh Figur Laki-laki. (Siti Musdah Mulia & Anik Farida :20)
- Kondisi Perempuan. (Marwah Daud Ibrahim)
- Lemahnya Daya Saing Perempuan. (Ihromi : 49)
- b. Faktor Eksternal (Siti Musdah Mulia & Anik Farida)
 - Budaya Patriarki
 - Sistem Politik Yang Tidak Ramah Terhadap Perempuan
 - Pemahaman Agama

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif . Kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Unit Analisa

Yang menjadi unit analisa data dalam penelitian ini adalah :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yaitu LSM Makuwaje, LSM Goceva, LSM Daur Mala dan FOSHAL

- b. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Ketua Umum Partai PDK dan Ketua PDK Cabang Kecamatan Ternate Utara dan Tim Sukses Nita Budi Susanti.
 - c. Pemda Provinsi Maluku Utara yaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan.
 - d. KPUD Kota Ternate.
3. Teknik Sampling

Adapun teknik sampling yang diambil Peneliti dalam penelitian ini adalah non probability sampling, yaitu purposive sampling dalam teknik pengambilan sample disesuaikan dengan tujuan penelitian. ukuran sample tidak dipersoalkan dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan criteria-kriteria tertentu yaitu :

- Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan hasil yang diketahui peneliti dari masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat yang netral artinya bahwa LSM ini tidak mempunyai keterpihakan pada salah satu kandidat dalam Pilkada yaitu LSM Makuwaje (*Saling Mengingatkan*) yang bergerak dalam bidang hukum dan advokasi, LSM Goceva (*Governance Education For Action*) yang bergerak dalam bidang pemerintahan, LSM Daur Mala (*Daulat Perempuan*

Maluku Utara) bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan lembaga ini yang mewakili suara perempuan Dan Foshal (Forum Studi Halmahera) NGO ini juga dikenal sebagai forum pemerhati tentang pemberdayaan perempuan.

- Tokoh Masyarakat Yaitu Tokoh Agama dan Tokoh Ilmuan, Dengan melihat bahwa jumlah masyarakat yang banyak dan waktu yang dimiliki oleh peneliti terbatas maka, pilih mengambil Tokoh Masyarakat Sebagai sumber data yang dapat mewakili suara masyarakat dan yang mengetahui Proses Pilkada.
- Pemerintah Daerah tepatnya pada Bagian Pemberdayaan Perempuan. Sebagai lembaga pemerintah yang mengetahui perkembangan masyarakat khususnya perempuan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan respon pemerintah terhadap pencalonan Nita Budi Susanti dalam pilkada.
- Partai Politik Yaitu Partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) sebagai Partai yang mendukung atau yang mencalonkan Nita Budi Susanti sebagai calon walikota dan Tim Sukses Nita Budi Susanti.

- KPUD Kota Ternate sebagai lembaga independent penyelenggara pemilihan kepala daerah langsung.guna untuk mendapatkan data sekunder.dan informasi jalannya pilkada.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan untuk pihak-pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter tentang daerah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview ini dilakukan sebagai metode pengumpulan data primer. Teknik interview digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data apabila jawaban atau pertanyaan dari responden kurang memenuhi harapan tujuan penelitian. Serta untuk mengetahui kecenderungan yang mungkin timbul dari gejala-gejala yang diteliti.

Upaya memperoleh informasi langsung yang akan peneliti lakukan adalah kepada Nita Budhi Susanti sebagai calon kepala daerah perempuan pertama dalam pilkadal 2005 di ternate serta tim sukses dan partai politik yang mencalonkannya, kepala KPUD kota ternate,

LSM yang bergerak dalam bidang demokrasi, hukum dan pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

6. Tehnik Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis data yang diperoleh baik dari penelitian atau kepustakaan adalah berupa naratif dan bukan merupakan angka-angka namun secara mendetail, jelas dan terinci. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan hasilnya dipaparkan dengan cara deskriptif (uraian)